

PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA BOGOR

TOURISM DEVELOPMENT FOR IMPROVING SOCIAL WELFARE BOGOR CITY

Andhika Al Fathanah¹, Bambang Wahyudi², Priza Audermando Purba³
Program Studi Ekonomi Pertahanan Universitas Pertahanan
(andhika.alfathanah@gmail.com)

ABSTRAK

Pengembangan pariwisata adalah kunci sukses Kota Bogor sebagai salah satu kota berkembang, yang mampu mentransformasikan Kota Bogor sebagai destinasi pariwisata sekaligus tujuan pariwisata. Adapun strategi pembangunan Kota Bogor yang dikembangkan berdasarkan destinasi pariwisata sangat berhubungan dengan konsep ekonomi pertahanan sehingga menempatkan masyarakat sebagai aktor utama. Permasalahan yang kemudian muncul yakni pengembangan pariwisata berimplikasi bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bogor. Kecenderungan peningkatan pendapatan asli daerah selama lima tahun terakhir memungkinkan potensi sektor pariwisata Kota Bogor sebagai alternatif pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian bertujuan melakukan analisis obyek pariwisata baru di Kota Bogor serta peningkatan sektor ekonomi baru melalui kegiatan pariwisata pada setiap kecamatan yang berada di wilayah Kota Bogor. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan observasi pada jajaran Pemerintah Kota Bogor sebagai tujuan wisata serta diskusi kelompok dengan penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata berkontribusi terhadap kesejahteraan Kota Bogor terutama pemerataan pendapatan sekaligus pemasukan kas daerah namun sarana dan prasarana serta infrastruktur pariwisata masih harus terus dibenahi sehingga menarik lebih banyak pengunjung ke Kota Bogor.

Kata Kunci : **Ekonomi Pertahanan, Pariwisata, Pengembangan**

ABSTRACT

Development of tourism is the success key of Bogor City as one of developing city, which able transformation bogor to tourism destination and tourism destination at the same time. The development strategy of Bogor City which is developed based on tourism destinations is closely related to the concept of defense economy that puts society as the main actor. The problem that comes is the development of tourism has implications for the welfare of the people of Bogor City. The trend of increasing regional original income over the past five years has enabled the potential of the Bogor City tourism sector as an alternative to alleviating poverty while increasing the welfare of the community. The research aims to analyze new tourism objects in the city of Bogor as well as to improve the new economic sector through tourism activities in each sub-district in the Bogor City area. The study used qualitative methods through interviews and observations on the ranks of the Bogor City Government as tourist destinations and group discussions with residents. The results of the study shows that the tourism sector contributes to the welfare of the city, especially in terms of equal distribution of income as well as regional cash inflows, but the facilities and infrastructure and tourism infrastructure still need to be improved so as to attract more visitors to the city of Bogor.

Keywords : **Economic Defense, Tourism, Developing**

¹ Penulis adalah Alumni Program Studi Ekonomi Pertahanan Cohort 8, Universitas Pertahanan

² Bambang Wahyudi merupakan Dosen Program Studi Ekonomi Pertahanan Universitas Pertahanan sekaligus Pembimbing I Tesis Penulis

³ Priza Audermando Purba merupakan Dosen Program Studi Ekonomi Pertahanan Universitas Pertahanan sekaligus Pembimbing II Tesis Penulis

1. PENDAHULUAN

Presiden Ir. Joko Widodo memiliki program Nawacita yang diwujudkan menjadi sembilan program kerja prioritas pemerintah, dalam rangka pembangunan Indonesia selama lima tahun kedepan⁴. Salah satu poin dari nawacita, pemerintah berupaya membangun Indonesia dari pinggiran. Upaya pemerintah Indonesia membangun dari pinggiran, merupakan cara pemerintah, agar pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Diantara permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, salah satunya adalah kesenjangan pembangunan antara kota dan desa⁵.

Distribusi pembangunan, merupakan amanat konstitusi Indonesia, sila ke-5, yaitu: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan distribusi pembangunan di wilayah Indonesia, pemerintah

membangun kawasan pariwisata baru⁶. Adapun sepuluh kawasan pariwisata baru di wilayah Indonesia, diantaranya; Danau Toba, Tanjung Kalayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo, dan Morotai. Kawasan pariwisata baru merupakan prioritas pemerintah agar pembangunan pariwisata dapat mendorong perekonomian daerah. Pengembangan pariwisata merupakan upaya distribusi pembangunan.

Menurut data WTO (World Tourism Organization) tahun 2017, pertumbuhan pariwisata global tumbuh sebesar 6%, adapun kawasan pariwisata di wilayah ASEAN (*Association of South East Asian Nation*), mengalami pertumbuhan pariwisata sebesar sebesar 7 %, sedangkan Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 25,68 %⁷. Bila melihat pertumbuhan pariwisata berdasarkan

⁴<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>, artikel diakses pada tanggal 06 September 2018, pukul 18.35 wib

⁵ Eka Sastra, 2017, Kesenjangan Ekonomi: Mewujudkan Keadilan Sosial Di Indonesia, (Jakarta: Expose), hlm 22

⁶<https://www.kompasiana.com/sunandarumar/55oddd12a33311ad2dba7d8d/pembangunan-pariwisata-dan-pengentasan-kemiskinan>, artikel diakses pada tanggal 06 September 2018, pukul 18.43 wib

⁷ M.Iqbal Alamsjah. Paparan Kementerian Pariwisata RI untuk KIDI ke-6 2016, slide nmr 10

data WTO (*World Tourism Organization*), pertumbuhan pariwisata Indonesia mengalami empat kali pertumbuhan pariwisata kawasan maupun global. Selama kurun waktu 2015-2016,

Selain pengembangan sepuluh destinasi pariwisata nasional oleh pemerintah Indonesia, beberapa kota maupun kabupaten di wilayah Indonesia telah berhasil dikembangkan menjadi destinasi pariwisata nasional maupun mancanegara. Adapun tiga pilar yang dikembangkan diantaranya sosial-budaya, pendidikan, serta pariwisata. Karakteristik destinasi pariwisata di Provinsi Jawa Barat pada umumnya memiliki persamaan yang tidak jauh berbeda.

Pertama, Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik diantaranya bukti otentik mengenai keberadaan Kerajaan Pajajaran (Sunda) berupa benda-benda peninggalan Kerajaan Pajajaran (Sunda) masih tersimpan di museum sejarah. Kedua, Provinsi Jawa Barat memiliki destinasi pariwisata alam diantaranya Lembang – Kota Bandung, serta perkebunan teh di kawasan Cianjur. Salah satu kota yang menjadi destinasi pariwisata, tidak jauh dari Ibukota, yaitu Kota Bogor.

Kota Bogor merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Kota Bogor memiliki beberapa destinasi pariwisata yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Sejak kepemimpinan Walikota Bogor Dr. Bima Arya, Kota Bogor memiliki visi sebagai Kota Pariwisata. Sehingga penataan tata kota, baik wilayah maupun destinasi pariwisata, merupakan agenda prioritas pemerintah, dalam mewujudkan Kota Bogor sebagai tujuan wisata, baik lokal maupun mancanegara. Pemerintah Kota Bogor memiliki program kerja dalam rangka meningkatkan destinasi pariwisata, serta pendapatan masyarakat Kota Bogor melalui sektor pariwisata.

Pengembangan pariwisata adalah program kerja pemerintah Kota Bogor, dalam mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Pariwisata. Pengembangan pariwisata merupakan peningkatan obyek pariwisata sebagai tujuan wisata bagi wisatawan. Salah satu upaya pengembangan pariwisata, yaitu penambahan obyek pariwisata. Pengembangan Kota Bogor sebagai Destinasi Pariwisata Internasional memiliki perspektif bahwa destinasi yang dimiliki oleh Kota Bogor mampu menjadi

destinasi internasional bagi turis manca-negara.⁸

Selain itu kekayaan alam yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Bogor menjadi modal utama untuk mengembangkan pariwisata lingkungan atau *eco-tourism*.⁹ Sebagai salah satu wilayah yang berada di provinsi Jawa Barat, Bogor memiliki dua wilayah pemerintahan, yaitu; kota dan kabupaten. Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor memiliki potensi pariwisata yang berbeda. Hal ini merupakan keunikan, serta ciri khas yang dimiliki oleh Kota maupun Kabupaten Bogor. Keunikan sebagai pusat pemerintahan diantaranya menjadi aktivitas kenegaraan yang bertempat di Istana Bogor menjadi ciri khas tersendiri bagi Kota Bogor.

PAD (pendapatan asli daerah) Kota Bogor ditopang melalui penerimaan pajak, yang terdiri dari pajak hotel, restoran dan hiburan. Penerimaan yang berasal dari pajak hotel, restoran, serta hiburan, setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Kota Bogor, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD naik sebesar 31%. Kontribusi terbesar pajak terhadap PAD Kota Bogor disumbangkan oleh pajak restoran atau kuliner. Pada tahun 2015, sektor kuliner menyumbangkan pajak sebesar Rp. 76 miliar, selanjutnya, pada tahun 2016, penerimaan pajak restoran atau kuliner mencapai Rp. 98 miliar. Pemerintah Kota Bogor optimis, tahun 2017, PAD dapat meningkat.

Seiring PAD Kota Bogor yang memiliki kecenderungan meningkat selama lima tahun terakhir, melalui data diatas, disisi lain, persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kota Bogor. Kemiskinan merupakan persoalan bersama baik pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Pada tahun 2017, Kota Bogor masih memiliki 71,3 ribu warga miskin, sedangkan anggaran pemerintah Kota Bogor, baru terserap 69,69 % atau sekitar Rp 1,7 triliun, dari alokasi belanja sebanyak Rp 2,58 triliun¹⁰.

Oleh sebab itu, potensi sektor pariwisata yang dimiliki oleh Kota Bogor,

⁸ Bendi Mulyana, Pengembangan Kota Bogor Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional, *Jurnal Universitas Udayana*, 2012

⁹ Farah, Pola Pengembangan Wisata Alam di Kabupaten Bogor, *Jurnal Hospitality dan Pariwisata Vol. 3 No.1 Tahun 2017*

¹⁰ <https://bogor.pojoksatu.id/baca/fakta-fakta-angka-kemiskinan-kota-bogor-masih-tinggi-padahal-duit-anggaran-nya>, artikel diakses pada tanggal 06 September 2018, pukul 21.37 wib

dapat menjadi salah satu cara pemerintah kota, untuk mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata Kota Bogor merupakan alternatif agar tingkat kemiskinan dapat ditekan, serta pendapatan masyarakat turut meningkat.

Permasalahan yang kemudian muncul diantaranya pengembangan pariwisata, serta implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Bogor. Untuk itu penelitian yang dilakukan bermaksud melakukan analisa obyek pariwisata baru di Kota Bogor serta peningkatan sektor ekonomi baru melalui kegiatan pariwisata pada setiap kecamatan yang berada di wilayah Kota Bogor. Upaya pengembangan pariwisata oleh pemerintah Kota Bogor bagi pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya mendorong pengusaha lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan pariwisata, melalui produk-produk kreatif yang bercirikan keunikan yang dimiliki oleh Kota Bogor.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif

melalui studi pengembangan pariwisata sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian ini berfokus kepada pengembangan pariwisata di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, serta dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan pariwisata. Moleong (2005), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya¹¹.

Adapun Subjek penelitian terdiri dari dinas-dinas yang berada di lingkungan pemerintahan Kota Bogor, terkait dengan pengembangan pariwisata, serta pihak-pihak yang terkait dengan industri pariwisata sedangkan objek dari penelitian ini adalah pengembangan pariwisata yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor dalam kurung waktu lima tahun terakhir, serta implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Bogor melalui peningkatan pariwisata.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan

¹¹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Salemba Humanika, Jakarta 2014), hlm . 8-9

Huberman. Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.¹² Aktivitas dalam analisis data terdiri dari beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), Kondensasi Data (*Data Condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

3. PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Kota Bogor merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kota Bogor dikenal sebagai Kota Hujan, suasana iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan mencapai 26°C dengan suhu terendah 21,8°C dan suhu tertinggi mencapai 30°C. Kota Bogor memiliki luas wilayah sebesar 118,50 km², dahulu luas wilayah Kota Bogor hanya seluas 21,56 km². Jarak Kota Bogor menuju Ibukota mencapai ± 60km. Kota Bogor merupakan salah satu diantara kota-kota peyangga Ibukota. Kota Bogor termasuk dalam kawasan Jabodetabek

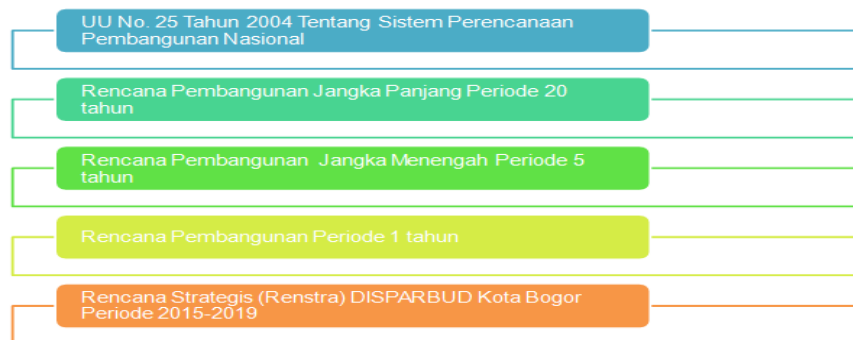
(Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

Pengembangan pariwisata di Kota Bogor didasari Undang-undang Kepariwisata No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Presiden (Perpres) No. 19 Tahun 2015 tentang Kementrian Pariwisata serta Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025. Adapun kebijakan Pemerintah Kota Bogor dalam membangun dan mengembangkan pariwisata di Kota Bogor diantaranya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor No. 9 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025.

Dalam upaya mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Wisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor mengeluarkan kebijakan strategis dalam upaya melaksanakan pembangunan pengembangan pariwisata di Kota Bogor, yaitu Rencana Strategis (Restra) periode 2015-2019, sebagai kebijakan dalam mempecepat pengembangan pariwisata Kota Bogor. Dalam menyusun Renstra, Disparbud Kota Bogor melakukan analisis landasan hukum Renstra. Hal ini dilakukan, agar Restra

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfa Beta, 2002).

tidak menyalahi aturan maupun pengembangan pariwisata yang kebijakan lain, berkaitan dengan digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Tahapan Penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 Kota Bogor

Sumber : Data diolah, 2018.

Pengembangan Pariwisata Kota Bogor

Pembangunan pengembangan pariwisata di Kota Bogor telah dimulai sejak tahun 2016, berdasarkan Rencana Induk Pembangunan (RIPDA) Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, merupakan dinas yang memiliki kewenangan teknis, dalam merencanakan pengembangan pariwisata.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Bogor memiliki visi untuk menjadikan Kota Bogor sebagai salah satu tujuan bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Bogor

melaksanakan pengembangan pariwisata.

Selanjutnya, salah satu aspek yang mendukung pengembangan pariwisata, yaitu infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud adalah akses jalan menuju tujuan pariwisata. Menurut Leiper, akses jalan merupakan salah satu indikator dalam mengembangkan suatu destinasi pariwisata yakni menghubungkan antara infrastruktur dengan destinasi pariwisata. Selain itu hubungan antara wisatawan dengan pengelola pariwisata dapat tercipta dengan baik, bila pemangku kebijakan atau pemerintah mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pariwisata.

Hal ini senada dengan hasil wawancara kepada Kepala BPS Kota

Bogor yang menekankan kepada pemerintah Kota Bogor agar pembangunan infrastruktur di Kota Bogor dapat dioptimalkan, sehingga akses menuju pariwisata, dapat ditempuh oleh wisatawan.

Seiring dengan program kerja pemerintah Kota Bogor mengenai pengembangan pariwisata, pemerintah Kota Bogor berupaya untuk menambah berbagai objek wisata di kawasan Kota Bogor. Salah satu program pemerintah Kota Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diantaranya membangun kampung tematik.

Konsep kampung tematik merupakan aktivitas partisipasi masyarakat secara aktif, tidak hanya sebatas pemberdayaan, namun menciptakan ruang kampung bagi pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) dengan ciri khas masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat setempat Idziak, Majewski, & Zmyslony (2015). Selanjutnya, gagasan mengenai konsep kampung tematik merupakan suatu kreativitas masyarakat desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan social.¹³ Menurut Kloczko-

¹³ Joseph E Stiglitz, *Mengukur Kesejahteraan*. (Jakarta: Marjin Kiri, 2011).

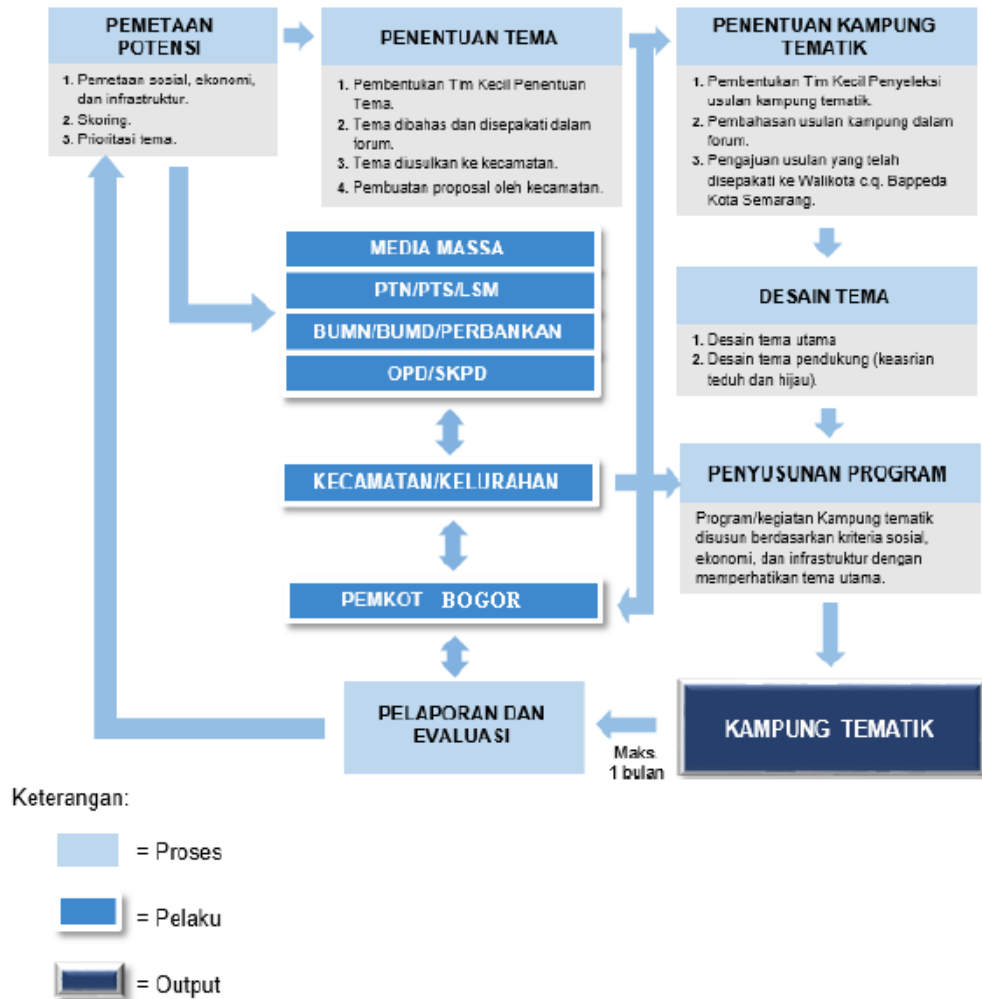
Gajewska (2014), ide atau gagasan muncul berdasarkan potensi yang dimiliki oleh suatu kampung.¹⁴ Potensi yang dimiliki dan dikembangkan menggunakan model kampung tematik pada Kota Bogor memanfaatkan potensi pertanian.

Pengembangan kampung tematik melalui basis pertanian merupakan pendekatan yang cocok dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan bagi wilayah pedesaan. Tujuan pembangunan kampung tematik dapat menciptakan kesejahteraan sosial, khususnya bagi masyarakat desa, serta berbagai hasil pertanian dapat didistribusikan ke pasar. Kampung Tematik Agro Eduwisata Organik yang telah dikembangkan oleh pemerintah Kota Bogor yakni Kampung Tematik Agro Eduwisata Organik yang berada di Kecamatan Bogor Selatan. Dengan Luas Wilayah mencapai 28,52 ha berupa usulan pengembangan mencakup pembangunan ruang penerimaan, area parkir, rumah kompos, area produksi biogas, penyediaan area sawah organik, area produksi dan pengembangan atraksi kebudayaan lokal/ seni budaya

¹⁴ Hunziker and Kraf, *Contributions to tourism education and tourism history*, (Bern: Federation Suisse du Tourisme, 1941).

(bengkel budaya). Adapun tahapan mengenai proses penyusunan rancang langkap kampung tematik, serta alur

kegiatan pembangunan kampung tematik dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 2 Proses Pelaksanaan Kampung Tematik

Sumber : Bappeda Kota Bogor, 2018.

Adapun pembangunan kampung tematik oleh pemerintah Kota Bogor dibangun berlandaskan basis agrowisata. Wilayah Kota Bogor direncanakan memiliki tujuh kampung tematik berdasarkan tujuh wilayah kecamatan diantaranya tiga wilayah dibangun kampung tematik berbasis pertanian, sedangkan empat wilayah dibangun berbasis potensi

wilayah setempat. Tiap kecamatan di Kota Bogor tersebut ,memiliki destinasi pariwisata yang berbeda-beda. Hal ini merupayakan upaya pemerintah Kota Bogor untuk mewujudkan distribusi pengembangan pariwisata di Kota Bogor sehingga setiap wilayah di Kota Bogor dapat menikmati manfaat pengembangan pariwisata.

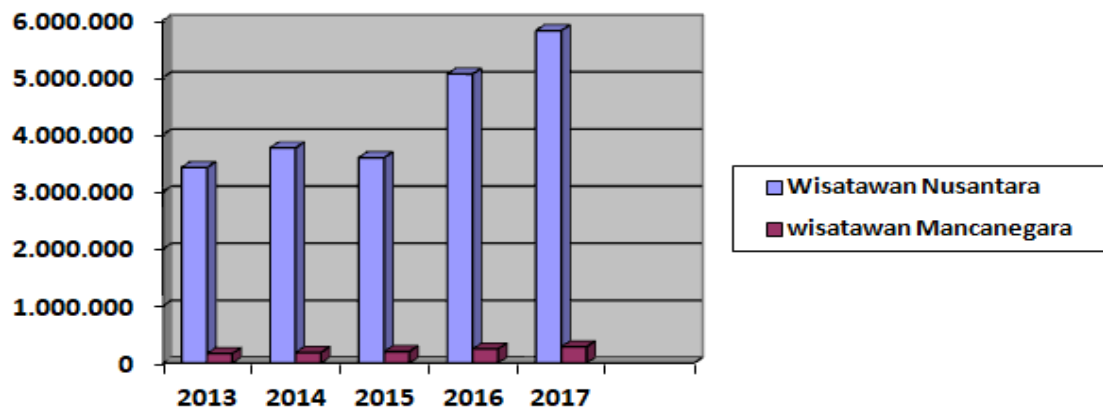
Hasil Penelitian dengan Kepala Bappeda Kota Bogor yakni pengembangan pariwisata Kota Bogor menjadi program pemerintah sebagai kegiatan untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui aktivitas usaha yang berkaitan dengan pelaku industri pariwisata. Diantaranya pengrajin kesenian, pedagang makanan, baik restoran, café, maupun pedagang kaki lima. Peran aktif ini dijalani pemerintah kota sebagai bagian pengembangan pariwisata, agar wisatawan dan pelaku industri pariwisata dapat memberikan keuntungan satu dengan lain. Hasilnya Wisatawan nyaman melakukan kegiatan pariwisata serta pelaku industri pariwisata dapat melakukan kegiatan usaha dengan aman.

Dengan demikian pengembangan Pariwisata oleh pemerintah Kota Bogor, selama lima tahun terakhir ini diupayakan untuk meningkatkan obyek pariwisata di Kota Bogor, melalui program pengembangan pariwisata. Wujud upaya pengembangan pariwisata antara lain sinergisitas program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Adapun dari perspektif pertahanan, pengembangan pariwisata secara langsung, meningkatkan pertahanan suatu wilayah.

Hal ini disebabkan aktivitas pariwisata yang berada di setiap kecamatan di Wilayah Kota Bogor, menjadi basis pertahanan yang kuat dan kokoh. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan pariwisata, senada dengan sistem pertahanan semesta. Sistem pertahanan semesta, melibatkan masyarakat sebagai komponen dasar sistem pertahanan negara. Setiap partisipasi masyarakat, khususnya dalam kegiatan pengembangan pariwisata, merupakan upaya mewujudkan pertahanan nasional secara luas, serta mendukung perekonomian, baik daerah maupun Negara.

Dampak Pariwisata terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Bogor

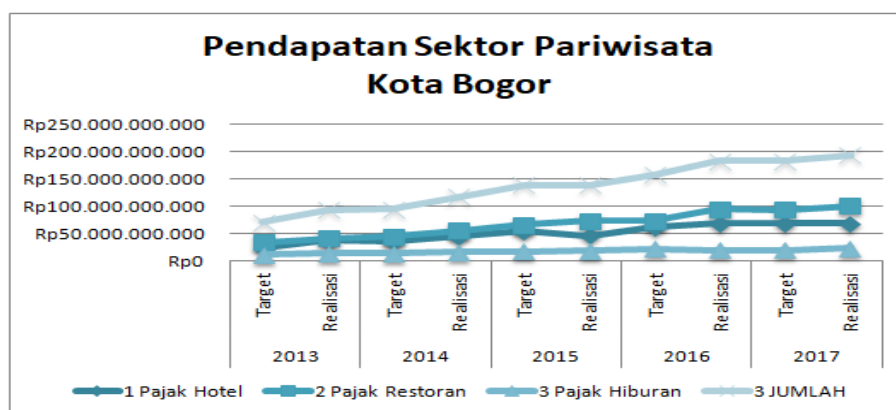
Secara umum, wisatawan yang berkunjung dari Kota Bogor berasal dari nusantara dan mancanegara. Kegiatan wisatawan yang mengunjungi Kota Bogor terbagi dua, yaitu berkunjung ke obyek wisata, atau hanya menginap atau bermalam (akomodasi) di Kota Bogor. Wisatawan asal nusantara masih mendominasi obyek wisata dan akomodasi. Sedangkan destinasi pariwisata Kota Bogor, setiap hari sabtu-minggu, maupun hari libur nasional, juga didominasi oleh Warga Jabodetabek sebagaimana diungkap gambar berikut :



Gambar 3 Grafik Wisatawan Kota Bogor
 Sumber : Disparbud Kota Bogor, 2018.

Berdasarkan tren grafik diatas, wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor mengalami peningkatan. Dari grafik diatas, menjelaskan bahwa, pemerintah kota harus berupaya untuk melakukan promosi pariwisata ke mancanegara. Hal ini dilakukan, agar wisatawan asal mancanegara dapat meningkat, serta berkunjung ke Kota Bogor. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendorong

pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah. Sejak lima tahun terakhir, dari tahun 2013-2017 pendapatan dari sektor pariwisata mengalami peningkatan secara signifikan. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pariwisata. Adapun kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan Kota Bogor yakni sebagai berikut :



Gambar 4 Pendapatan Sektor Pariwisata Kota Bogor
 Sumber : Bappeda Kota Bogor, 2018.

Pendapatan pemerintah Kota Bogor dari sektor pariwisata terbagi ke dalam tiga pendapatan, yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Pajak restoran merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan pemerintah Kota Bogor. Pajak restoran diatur dalam Perda (Peraturan Daerah) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Setiap usaha makanan, baik restoran, café, dan lain sebagainya, dikenakan biaya pajak yang dibebankan langsung kepada konsumen sebesar 10%. Demikian pula dengan usaha makanan yang berada di perhotelan. Pengelola hotel menarik langsung dari pajak restoran dari biaya menginap konsumen.

Pajak restoran merupakan sektor pajak yang memberikan kontribusi besar kepada pendapatan daerah. Pada tahun 2013-2017, penerimaan pajak restoran selalu melebihi target yang ditentukan oleh pemerintah kota. Oleh sebab itu, pajak restoran menjadi penerimaan yang vital bagi pemasukkan kas daerah. Pada tahun 2013, target penerimaan pajak dari hotel sebesar Rp. 24.000.000.000, realisasi pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 32.720.000.000, naik sebesar Rp. 8.420.000.000 atau sebesar $\pm 40\%$ dari target yang ditentukan. Pada tahun

2014, target penerimaan pajak dari hotel sebesar Rp. 35.585.000.000. Realisasi penerimaan yang diperoleh mencapai Rp. 45.639.000.000 atau sebesar $\pm 50\%$. Namun, pada tahun selanjutnya, target yang diharapkan meleset sedikit dari yang diharapkan. Pada tahun 2015, target penerimaan pajak dari hotel sebesar Rp. 54.430.000.000, namun realisasi penerimaan mencapai Rp. 46.000.000.000. Turun sebesar $\pm 10\%$, pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2016, target penerimaan pajak naik sebesar $\pm 5\%$, dari Rp. 62.301.032.639 menjadi Rp. 68.500.000.000. Lalu, pada tahun 2017, target penerimaan pajak sebesar Rp. 68.500.000.000, naik hanya sebesar $\pm 1\%$, yaitu mencapai Rp. 68.839.312.012.

Dampak dari pengembangan pariwisata memberikan efek positif bagi peningkatan UMKM di Kota Bogor. Dinas Koperasi & UMKM memberikan kesempatan kepada UMKM untuk mengembangkan diri, serta berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan pariwisata di Kota Bogor. Hasil wawancara dengan Kadis Koperasi dan UMKM, legalitas pelaku UMKM menjadi sangat penting, agar UMKM dapat bankable, mendapatkan modal dari bank. Sehingga, UMKM dapat

tumbuh, serta mampu meningkatkan usaha mereka ke jenjang yang lebih

besar lagi. Jumlah UMKM semakin meningkat diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1 Rekapitulasi Data UMKM Kota Bogor Tahun 2015-2018

NO	KECAMATAN	DATA UMKM				JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	
1	TANAH SAREAL	1671	75	14	71	1831
2	BOGOR BARAT	4491	216	18	0	4725
3	BOGOR TIMUR	1347	349	96	142	1934
4	BOGOR SELATAN	2902	122	968	29	4021
5	BOGOR UTARA	2653	190	1	14	2858
6	BOGOR TENGAH	1347	238	43	133	1761
7	SUKARAJA	0	1	0	0	1
TOTAL		14.411	1.191	1.140	389	17.131

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor, 2018.

Rekapitulasi Data UMKM Kota Bogor Tahun 2015-2018 menunjukkan jumlah yang semakin meningkat seiring dengan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Hal ini juga mendorong masyarakat untuk menghasilkan berbagai produk-produk kreatif, unik, serta khas Kota Bogor. Selain itu dukungan juga muncul dari beberapa organisasi yang mewadahi UMKM di Kota Bogor sebagai bentuk monitoring pemerintah kota dan dinas koperasi dan umkm, mengenai jumlah umkm di Kota Bogor. Keberadaan organisasi-organisasi UMKM ini aktif mengedukasi para pelaku UMKM agar dapat bersama-sama tumbuh, mendapatkan pendampingan usaha, baik berbentuk modal, pelatihan, serta sosialisasi berbagai kebijakan mengenai

umkm, yang dikeluarkan oleh pemkot dan pemerintah pusat.

Pengembangan Kota Bogor sebagai Kota Pariwisata juga menarik sebagai kota sejarah, sehingga saat ini pemerintah kota sedang mengusulkan Kota Bogor sebagai Kota Pusaka. Hal ini disebabkan keberadaan warisan sejarah yang sangat beragam berada di Kota Bogor. KotaKota Pusaka merupakan upaya dalam rangka menjaga cagar budaya, serta warisan sejarah, sebagai asset dan peninggalan sejarah bagi Kota Bogor Selain itu, Kota Pusaka mendorong pemerintah kota untuk melakukan penataan kota secara komprehensif. Pembangunan berkelanjutan, yaitu, memperhatikan berbagai aspek, termasuk aspek sejarah atau cagar budaya, sebagai fondasi

membangun kota di masa-masa yang akan datang.

4. Kesimpulan

Penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan pariwisata yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bogor, dapat menciptakan obyek pariwisata baru, serta mengoptimalkan potensi ekonomi setempat, sebagai pemasukkan bagi kas daerah, maupun pendapatan perekonomian masyarakat sekitar. Salah satunya, yaitu kampung tematik.

Seiring dengan terciptanya aktivitas ekonomi baru di setiap kecamatan, melalui pengembangan pariwisata, pertahanan kota yang meliputi aspek kewilayahan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang terkait dengan kegiatan pariwisata senada dengan sistem pertahanan semesta, masyarakat sebagai komponen dasar sistem pertahanan negara.

Pengembangan pariwisata memberikan kontribusi positif bagi penerimaan kas daerah, serta kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kota

Bogor, sebagian besar disumbangkan oleh penerimaan pajak dari sektor pariwisata. Selanjutnya, jumlah pengusaha lokal turut meningkat melalui pengembangan pariwisata, melalui berbagai usaha kreatif, serta kerajinan lokal.

Rekomendasi yang ditawarkan terutama bagi pemerintah kota, yaitu pemerintah kota dapat menyelesaikan pengembangan pariwisata periode 2016-2015. Hal ini disebabkan agar obyek pariwisata yang diciptakan oleh pemerintah kota, dapat menghasilkan pemasukkan kas daerah yang optimal, serta meningkatkan kesejahteraan semakin meningkat, dan kemiskinan semakin menurun.

Sebagai upaya perbaikan dan pengembangan penelitian berikutnya, diharapkan agar cakupan penelitian ditingkatkan hingga Provinsi Jawa Barat. Sehingga berbagai potensi pariwisata yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, dapat teridentifikasi, serta dapat dikembangkan sebagai destinasi pariwisata internasional, serta usaha – usaha rakyat dapat terangkat melalui pengembangan pariwisata se tingkat provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Haris Herdiansyah. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika: Jakarta.

Hunziker and Kraf. 1941. *Contributions to tourism education and tourism history*. Bern: Federation Suisse du Tourisme.

Joseph E Stiglitz. 2011. *Mengukur Kesejahteraan*. Jakarta: Marjin Kiri.

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfa Beta.

Peraturan

UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata

UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Peraturan Presiden (Perpres) No. 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor No. 9 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025

Paparan Perkuliahan

M.Iqbal Alamsjah. Paparan Kementerian Pariwisata RI untuk KIDi ke-6 2016, slide nmr 10

Jurnal

Eka Sastra, 2017, Kesenjangan Ekonomi: Mewujudkan Keadilan Sosial Di Indonesia, (Jakarta: Expose), hlm 22

Bendi Mulyana, Pengembangan Kota Bogor Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional, *Jurnal Universitas Udayana*, 2012

Farah, Pola Pengembangan Wisata Alam di Kabupaten Bogor, *Jurnal Hospitality dan Pariwisata Vol. 3 No.1 Tahun 2017*

Website

<https://bogor.pojoksatu.id/baca/fakta-fakta-angka-kemiskinan-kota-bogor-masih-tinggi-padahal-duit->

anggarannya, artikel diakses pada tanggal 06 September 2018, pukul 21.37 wib

<https://www.kompasiana.com/sunandarumar/550ddd12a33311ad2dba7d8d/pembangunan-pariwisata-dan-pengentasan-kemiskinan>, artikel diakses pada tanggal 06 September 2018, pukul 18.43 wib

<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>, artikel diakses pada tanggal 06 September 2018, pukul 18.35 wib